



Peran Food and Agriculture (FAO) dalam Mengatasi Permasalahan Ketahanan Pangan di Kamboja Tahun 2016-2018

Made Indah Desiana Darmayanti¹⁾, Ni Wayan Rainy Priadarsini²⁾, Putu Titah Kawitri Resen³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran organisasi internasional FAO dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan di Kamboja pada tahun 2016-2018 ditinjau dari Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pengembangan di tingkat lokal dan nasional menggunakan metode kualitatif deskriptif. Masalah kerawanan pangan yang kemudian berdampak pada tingginya kasus malnutrisi khususnya kekurangan gizi pada anak di Kamboja menarik perhatian FAO. Selaku perpanjangan tangan PBB, FAO bekerja sama dengan Pemerintah Kamboja melalui *Country Programming Framework* (CPF). FAO berupaya menangani permasalahan kerawanan pangan di Kamboja dengan cara membangun suatu kerangka kerja pemantauan yang menyajikan alat evaluasi melalui *Country Programming Framework* (CPF), serta melakukan mekanisme yang dapat diambil oleh organisasi internasional untuk menciptakan kondisi yang diharapkan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di tingkat lokal melalui beberapa program seperti *Farmers Business School* (FBS), *Project for Agricultural Development and Economic Empowerment* (PADEE), dan *Participatory Guarantee Systems* (PGS); dan di tingkat nasional melalui program *Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation* (FIRST). Oleh karenanya, peneliti menggunakan kerangka konseptual ketahanan pangan serta peran organisasi internasional dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi untuk menjawab peran FAO dalam permasalahan ketahanan pangan di Kamboja pada tahun 2016 hingga 2018 ditinjau dari Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pengembangan di tingkat lokal dan nasional.

Kata-kunci : Food and Agriculture Organization, Kamboja, Ketahanan Pangan, Peran Organisasi Internasional.

Abstract

This study aims to describe the role of the international organization FAO in effort to tackle food insecurity in Cambodia in 2016-2018 in terms of the Monitoring Function and Development Function at local and national level by using descriptive qualitative method. The problem of food insecurity that has an impact on the high rates of malnutrition specifically childhood malnutrition is extremely widespread in Cambodia gain major concern from FAO. As a United Nations agency, FAO established a collaboration between FAO and the Royal Government of Cambodia through Country Programming Framework (CPF). FAO is striving to tackle food insecurity in Cambodia by establishing a framework that provides evaluation tolos through Country Programming Framework (CPF), and implement the mechanisms international organizations can adopt to create enabling conditions at local level through various programs such as Farmers Business School (FBS), Project for Agricultural Development and Economic Empowerment

(PADEE), and Participatory Guarantee Systems (PGS); and national level through Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation (FIRST) program. Therefore researcher used the framework of food security and the role of international organization in achieving food security to answer FAO's role in effort to tackle food insecurity in Cambodia in 2016-2018 in terms of the Monitoring Function and Development Function at local and national level.

Keywords : *Cambodia, Food Security, Food and Agriculture Organization, The Role of International Organizations.*

Kontak Penulis

Made Indah Desiana Darmayanti

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Denpasar, 80114

E-mail : indah.desiana@yahoo.com

PENDAHULUAN

Berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan meredanya konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, mengakibatkan pergeseran fokus akan sumber ancaman terhadap keamanan suatu negara. Isu-isu keamanan mengalami perluasan makna, yang mana sebelumnya hanya terfokus pada aspek militer atau ancaman fisik sebagai bentuk ancaman terhadap keamanan suatu negara. Kini melihat bahwa adanya berbagai bentuk ancaman keamanan baru yang muncul dari aktor non negara dan ancaman non militer (Sagena, 2013). Hal ini melahirkan kajian keamanan non tradisional. Ancaman dalam kajian keamanan non tradisional tidak hanya dilihat sebagai bentuk ancaman yang hanya mengancam kedaulatan negara dan wilayahnya, namun juga mengancam keamanan masyarakat, baik kelompok ataupun individu (Trihartono *et al.*, 2020).

Salah satu dimensi yang diangkat dalam keamanan manusia adalah *food security* atau juga dikenal sebagai ketahanan pangan. Munculnya isu ketahanan pangan ini tidak dapat dilepaskan dari pandangan negara-negara yang hirau akan pentingnya meningkatkan dan mempertahankan ketahanan pangannya secara berkelanjutan untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, layak, dan aman (Pujayanti, 2011). Dalam perjalanannya, negara tidak selalu mampu menjamin akses masyarakatnya terhadap pangan. David Jones menyoroti peristiwa krisis pangan pada tahun 1974 sebagai bukti bahwa negara membutuhkan negara lain dalam menyelesaikan masalah pangan di suatu negara (Jones, 1976). Negara-negara menyadari pentingnya kerjasama internasional dalam menangani permasalahan pangan, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pangan. Salah satunya adalah dengan membentuk organisasi

internasional *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak awal didirikan pada tahun 1945, FAO menjadi organisasi internasional yang berfokus pada bidang pangan dan agrikultur (FAO, 2018). Sebagai organisasi pangan dan agrikultur dunia, FAO bertujuan untuk membantu negara-negara dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan agrikultur dan pangan termasuk didalamnya isu kelaparan, kerawanan pangan, dan malnutrisi (OECD/FAO, 2016).

Fenomena kerawanan pangan masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Kamboja setiap tahunnya (WFP, 2017).

Kerawanan pangan yang terjadi di Kamboja kemudian berdampak pada kasus malnutrisi khususnya kekurangan gizi. Pada tahun 2014 jumlah anak berusia di bawah 5 tahun yang menderita kekurangan gizi di Kamboja cukup tinggi, dengan presentase 32,4% anak mengalami *stunting* yang mana cukup tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata di kawasan Asia yakni sebesar 21,8%, serta 9,7% anak mengalami *wasting* persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata di kawasan Asia yakni 8,9% (Global Nutrition Report, 2014). Dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kamboja, pada tahun 2016 FAO membantu Kamboja melalui *Country Programming Framework* (CPF) yang dilakukan hingga tahun 2018. Berdasarkan pada pemaparan latar belakang, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana peran FAO dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan di Kamboja tahun 2016-2018.

Penelitian ini menggunakan dua literatur sebagai kajian pustaka, yang pertama literatur dari Richard J. Culas dan Kimsong Tek tahun 2016 yang berjudul "*Food Security in Cambodia: Trends and Policy Objectives*". Tulisan Culas dan Tek membantu peneliti memahami isu kerawanan pangan yang terjadi di Kamboja.

Penelitian ini menggunakan dua literatur sebagai kajian pustaka, yang pertama literatur dari Richard J. Culas dan Kimsong Tek tahun 2016 yang berjudul "*Food Security in Cambodia: Trends and Policy Objectives*". Tulisan Culas dan Tek membantu peneliti memahami isu kerawanan pangan yang terjadi di Kamboja.

Tulisan milik Culas dan Tek berfokus pada fenomena ketersediaan pangan yang cukup di tingkat nasional, ternyata tidak menjamin adanya ketahanan pangan di tingkat individu maupun rumah tangga yang terjadi di Kamboja. Literatur kedua yang penulis gunakan adalah tulisan milik Kesso G Van Zutphen, Srujith Lingala, Madhavika Bajoria, Kalpana Beesabathuni, dan Klaus Kraemertahun 2018 yang berjudul *“The Role of International Agencies in Achieving Food Security”*. Tulisan ini memaparkan peran yang dilakukan oleh lembaga internasional dalam menangani permasalahan ketahanan pangan dan gizi. Lembaga internasional memiliki empat fungsi dalam menjalankan perannya mencapai ketahanan pangan dan gizi. Empat fungsi tersebut adalah Fungsi Pengawasan, Fungsi Pengembangan, Fungsi Perlindungan Sosial, dan Fungsi Koordinasi.

Konsep ketahanan pangan pertama kali muncul di tahun 1970-an, ketika dilaksanakan konferensi pangan dunia (*World Food Conference*) pada tahun 1974 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Roma. Saat itu ketahanan pangan didefinisikan sebagai ketersediaan makanan dari waktu ke waktu yang memadai bagi kebutuhan pokok manusia, mempertahankan dari ekspansi kebutuhan manusia yang semakin meningkat yang diiringi dengan meningkatnya kuantitas populasi manusia, dan mengimbangi fluktuasi harga dan produksi pangan baik di tingkat domestic maupun lokal (Maxwell, 2001 dalam Rivai, 2020). Berdasarkan definisi tersebut fokus ketahanan pangan pada saat itu hanya menitikberatkan pada ketersediaan pangan.

Menurut Simon (2017) konsep ketahanan pangan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan pada konsep ketahanan pangan kemudian menyebabkan munculnya dimensi penting lainnya, sehingga memperluas sudut pandang sebelumnya yang hanya berfokus

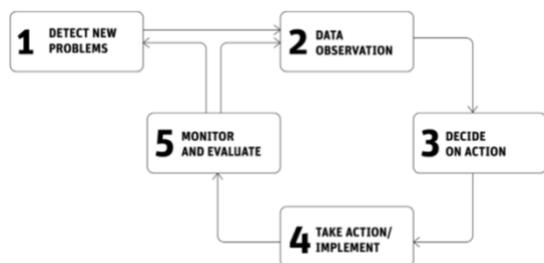
pada dimensi ketersediaan pangan. Saat ini, definisi ketahanan pangan merujuk kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ketahanan pangan dan gizi. Komite Ketahanan Pangan Dunia PBB mendefinisikan ketahanan pangan sebagai “kondisi dimana semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi ke makanan yang cukup, aman, dan bergizi yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan pangan untuk hidup aktif dan sehat” (Zutphen *et al.*, 2018)

Menurut Maxwell dan Smith (1992) yang dikutip oleh Culas dan Tek (2016), berargumen bahwa masalah ketahanan pangan berfokus pada tiga dimensi yakni ketersediaan pangan secara menyeluruh, akses pangan pada tingkat rumah tangga, dan pemanfaatan pangan pada masing-masing individu. Adapun yang dimaksud dengan ketersediaan pangan adalah keberadaan fisik pangan pada tingkat rumah tangga hingga nasional yang diproduksi sendiri maupun dibeli. Sementara yang dimaksud dengan akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan makanan yang sesuai dan bergizi. Sedangkan pemanfaatan pangan pada tingkat individu adalah kemampuan tubuh seseorang untuk mengubah makanan menjadi energi. Konsep *food security* milik Maxwell dan Smith bermanfaat sebagai dasar analisis untuk memahami isu ketahanan pangan di negara Kamboja.

Zutphen *et al* (2018) memaparkan empat fungsi yang dimiliki organisasi internasional dalam menjalankan perannya mencapai ketahanan pangan yakni Fungsi Pengawasan, Fungsi Pengembangan, Fungsi Perlindungan Sosial, dan Fungsi Koordinasi.

Pada Fungsi Pengawasan sangat penting bagi organisasi internasional membangun suatu kerangka kerja pemantauan yang menyajikan alat evaluasi. Alat tersebut adalah *Surveillance Cycle* yang nantinya alat ini bias mengidentifikasi bagaimana intervensi

antar kebijakan berpengaruh terhadap hasil yang diharapkan.



Gambar 1.1 Surveillance Cycle

Sumber: Zutphen et al, 2018

Surveillance Cycle dimulai melalui pengumpulan data dan analisis (Kotak 2), hasil dari analisis kemudian mengarah pada keputusan tindakan/langkah-langkah yang dapat diambil (Kotak 3). Selanjutnya tindakan/langkah-langkah yang telah ditentukan diimplementasikan (Kotak 4). Kemudian dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dapat menghasilkan data baru (Kotak 5). Melalui proses pemantauan apabila ditemukan masalah baru (Kotak 1) maka siklus dimulai lagi. Sehingga fungsi pengawasan akan menghasilkan keputusan yang menuju peningkatan nutrisi dari populasi suatu Negara.

Fungsi Pengembangan merupakan fungsi yang menjelaskan mekanisme yang dapat diambil oleh organisasi internasional, untuk menciptakan kondisi yang diharapkan dalam meningkatkan ketahanan pangan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Pada tingkat lokal penting bagi organisasi internasional melakukan upaya untuk menciptakan peluang bagi petani kecil dan produsen makanan lokal untuk berpartisipasi dalam pasar lokal tanpa harus bergantung pada korporasi besar. Kebebasan ketergantungan terhadap korporasi besar dapat dicapai dengan meningkatkan investasi di ekosistem lokal; memperkuat kapasitas teknis dan manajerial pemangku kepentingan; kemudahan fasilitas ke akses pembiayaan; dan pemberian kesempatan

kepada petani untuk mengatur dirinya. Di tingkat nasional penting bagi organisasi internasional mendukung pemerintah untuk menerapkan kebijakan terkoordinasi untuk memastikan ketahanan pangan. Selain berinvestasi di lembaga penelitian dan pengujian keamanan pangan yang lebih baik, organisasi internasional dapat membantu dengan menyelaraskan standar dan peraturan, inspeksi, sertifikasi, dan prosedur akreditasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Sementara itu, di tingkat internasional penting bagi organisasi internasional menyediakan ekosistem pendukung di tingkat internasional yang memfasilitasi kerjasama antar pemerintah nasional, yang dapat memandu dan mendukung perubahan transformatif yang diperlukan untuk mengatasi kerawanan pangan dan malnutrisi.

Pada Fungsi Perlindungan Sosial organisasi internasional berfokus pada pemberian dukungan kepada kelompok rentan melalui program darurat. Adapun program darurat yang dimaksud adalah berupa subsidi, pemberian bantuan tunai, pemberian bantuan pangan, manajemen makanan cadangan, serta kemitraan publik swasta. Sementara itu pada Fungsi Koordinasi menjelaskan bahwa organisasi internasional perlu membentuk badan koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengkoordinasikan target ketahanan pangan di tingkat nasional dan internasional.

Konsep Peran Organisasi Internasional dalam Mencapai Ketahanan Pangan digunakan sebagai alat ukur dalam melihat peran FAO selaku organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan di Kamboja. Penulis akan menggunakan Fungsi Pengawasan serta Fungsi Pengembangan yang terdiri dari tingkat lokal dan nasional sebagai fokus penulis untuk menguatkan analisis terkait peran FAO dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan di Kamboja.

Konsep Peran Organisasi Internasional dalam Mencapai Ketahanan Pangan bermanfaat sebagai dasar analisis untuk melihat peran FAO dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan di Kamboja.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Suryabrata (2014) penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjabarkan situasi ataupun kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Adapun salah satu tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menjabarkan suatu masalah serta menjustifikasi keadaan yang sedang berlangsung.

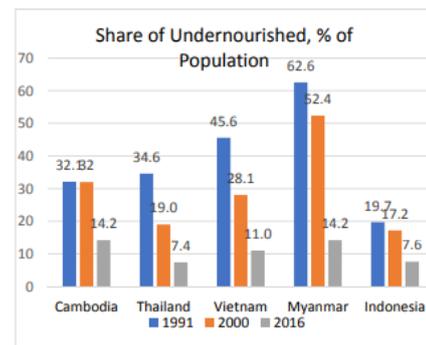
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka atau studi literatur. Menurut Hasan (2002) data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen pendukung yang telah ada maupun telah dikumpulkan oleh Peneliti lain yang melakukan penelitiandarisumber-sumber yang telah ada. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder seperti buku, jurnal, media massa, publikasi pemerintah dan organisasi internasional.

Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat analisis kelompok/organisasi. Menurut Margaret Hermann dan Charles Hermann (dalam Neck, 2008: 66) dalam tingkat analisis kelompok diasumsikan bahwa kebijakan yang diambil oleh seorang pembuat keputusan dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang ada disekitarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

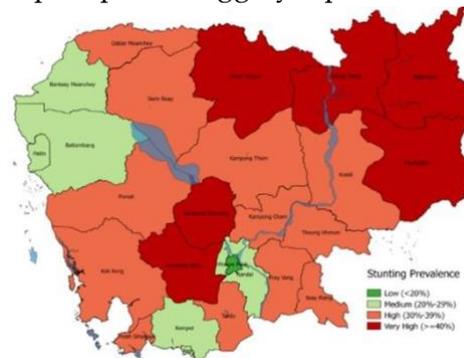
Isu Kerawanan Pangan di Kamboja

Isu kerawanan pangan masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Kamboja (Council for Agricultural and Rural Development, 2008). Kerawanan pangan yang terjadi di Kamboja kemudian berdampak pada kasus malnutrisi, khususnya kekurangan gizi.



Gambar 1.1 Persentase Penduduk Kurang Gizi
Sumber: FAO dalam Poliveth, 2019

Berdasarkan Gambar 1.1 meskipun telah terjadi penurunan persentase kasus kekurangan gizidari 32% di tahun 2000 menjadi 14,2% di Kamboja, namun angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. Thailand misalnya dari 19% di tahun 2000 menjadi 7,4% di tahun 2016, Vietnam dari 28,1% menjadi 11,0%, dan Indonesia dari 17,2% menjadi 7,6% (Poliveth, 2019). Lebih lanjut, kasus kekurangan gizi berdampak pada tingginya persebaran kasus



stunting di Kamboja.

Gambar 1.2 Prevalensi *Stunting* di Kamboja

Menurut Wilayah

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 dalam WFP, 2017

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa kasus *stunting* merupakan kondisi yang lazim yang dapat ditemukan di berbagai wilayah di Kamboja. Kerawanan pangan yang terjadi di Kamboja disebabkan oleh tidak terpenuhinya tiga dimensi dalam ketahanan pangan. Tiga dimensi tersebut adalah ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, akses terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan di tingkat individu.

Kerawanan pangan di Kamboja merupakan permasalahan yang dihadapi umumnya oleh penduduk di daerah pedesaan (Sopha, 2011). Kerawanan pangan yang terjadi disebabkan oleh terbatasnya jumlah pangan minimum di tingkat rumah tangga akibat dari minimnya lahan untuk bertani. Di kamboja, luas lahan yang dianggap sebagai ambang batas untuk memenuhi kebutuhan beras giling untuk satu keluarga yang beranggotakan lima orang adalah 1 hektar are (ha). Sedangkan di daerah pedesaan, sebanyak 20% rumah tangga di pedesaan tidak memiliki lahan, 20% rumah tangga lainnya memiliki luas lahan yang tidak lebih dari 0,5 ha, serta 25% lainnya memiliki luas lahan antara 0,5 hingga 1 ha. Hal ini kemudian menyebabkan hanya sekitar 35% rumah tangga di pedesaan yang memiliki lahan yang cukup, untuk memproduksi beras yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan rumah tangga mereka sepanjang tahun (Noush, 2010).

Lebih lanjut, kerawanan pangan di Kamboja tidak hanya disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Namun juga disebabkan oleh permasalahan keterbatasan aksesibilitas penduduk pedesaan di Kamboja terhadap pangan. Keterbatasan aksesibilitas ini terjadi akibat dampak dari tingginya tingkat kemiskinan.

Wilayah	Penduduk yang rentan terhadap kemiskinan	Penduduk yang mengalami kemiskinan parah	Jumlah populasi
Nasional	21,1%	12,0%	100,0%
Perkotaan	13,6%	1,2%	16,1%
Pedesaan	22,5%	14,1%	83,9%

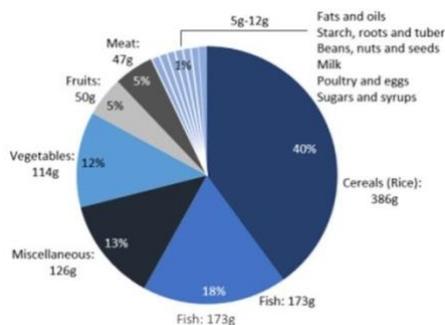
Gambar 1.3 Tingkat Kemiskinan di Kamboja Tahun 2014-2015

Sumber: Cambodia Demographic and Health Survey Tahun 2014-2015 dalam Oxford Poverty and Human Development Initiative, 2018

Berdasarkan Gambar 1.3 persentase penduduk yang mengalami kemiskinan parah di wilayah pedesaan lebih tinggi yakni sebanyak 14,1% dibandingkan dengan

penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan yakni sebanyak 1,2%. Di kamboja, tingginya jumlah rumah tangga pedesaan yang miskin disebabkan oleh tingkat pendapatan yang rendah. Sebagian besar rumah tangga di pedesaan sangat bergantung pada pembelian bahan makanan pokok di pasar untuk memastikan ketahanan pangan yang memadai (Noush, 2010). Mayoritas rumah tangga di pedesaan membeli bahan makanan pokok lainnya seperti buah-buahan (72%); sayuran (66%); tanaman umbi-umbian (58%); kacang-kacangan (71%); ikan (75%); serta daging/produk hewani (82%) dari pasar untuk memenuhi kebutuhan pangannya (WFP, 2017). Sehingga ketahanan pangan bagi mereka sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam membeli makanan yang mereka butuhkan (Council for Agricultural and Rural Development, 2008). Oleh karena itu rendahnya pendapatan tentu akan semakin membatasi kemampuan rumah tangga pedesaan untuk membeli pangan yang cukup, aman, dan bergizi.

Selain itu, kerawanan pangan yang terjadi di Kamboja, tidak hanya diakibatkan oleh keterbatasan aksesibilitas penduduknya terhadap pangan, namun juga pemanfaatan pangan yang tidak tepat yang kemudian berdampak pada tingginya kasus malnutrisi. Pemanfaatan pangan yang baik memerlukan makanan yang menyediakan energi dan nutrisi penting. Di kamboja, rendahnya diversifikasi makanan yang dikonsumsi hal ini dikarenakan nasi menjadi makanan yang menyediakan hingga 80% dari asupan energi harian (Monthivuth, 2011).



Gambar 1.4 Rata-rata Persentase Total Asupan Makanan Menurut Kelompok Makanan di Kamboja (Gram adalah konsumsi per kapita per hari)

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Perikanan Darat, 2012 dalam WFP, 2017

Berdasarkan Gambar 1.4 nasi dikonsumsi sebanyak 386g/orang/hari. Sehingga nasi menjadi makanan yang paling banyak dikonsumsi. Diikuti oleh ikan sebagai makanan terbanyak kedua dikonsumsi dengan 173g/orang/hari dan menyumbang 18% dari total asupan makanan. Sehingga minimnya diversifikasi makanan yang dikonsumsi oleh penduduk pedesaan Kamboja kemudian berdampak pada tingginya kasus malnutrisi yang terjadi di Kamboja.

FAO di Kamboja

Kamboja secara resmi menjadi anggota FAO di tahun 1950. Krisis kelaparan yang melanda Kamboja di akhir tahun 1970-an menjadi awal mula terjalinnya kerja sama antara FAO dan Kamboja yang pada saat itu masih bernama *People's Republic of Kampuchea* (PRK). Di awal kehadirannya, kerja sama antara FAO dan Kamboja berfokus pada bantuan kemanusiaan. Selama tahun 1980-an FAO aktif berpartisipasi dalam membantu pengentasan kelaparan, yang saat itu tengah melanda Kamboja (Smith, 2017). Kehadiran FAO di Kamboja kemudian diperkuat dengan dibukanya kantor perwakilan pada tahun 1994 yang berlokasi di Phnom Penh (FAO, 2022).

Di tahun 2016 FAO bekerja sama dengan pemerintah Kamboja melalui *Country Programming Framework* (CPF) 2016-2018 yang bertujuan dalam pengentasan kerawanan pangan dan malnutrisi di Kamboja. CPF ini sepenuhnya diselenggarakan dengan Rencana

Pembangunan Strategis Nasional Kamboja Tahun 2014-2018 dan dibuat setelah melalui konsultasi dengan beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Kementerian Lingkungan Hidup; Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Sumber Daya Air dan Meteorologi. Kerjasama ini kemudian disahkan melalui penandatanganan bersama *Joint Statement* oleh pemerintah Kamboja dan perwakilan FAO di Kamboja pada tanggal 17 Maret 2016 (FAO, 2016). Melalui penandatanganan tersebut FAO dan Kamboja berkomitmen untuk melakukan kerjasama melalui CPF yang dilakukan hingga tahun 2018. Selaku organisasi internasional yang bergerak di bidang pangan dan agrikultur, FAO telah melakukan berbagai program dalam upaya pengentasan kerawanan pangan dan malnutrisi di Kamboja.

Upaya FAO Melalui CPF Di Kamboja Tahun 2016-2018

• Upaya FAO dalam Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas dalam CPF Tahun 2016-2018 di Kamboja. FAO kemudian bekerja sama dengan pemerintah Kamboja dan berbagai pemangku kepentingan melalui beberapa kegiatan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kamboja. FAO bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pertanian serta Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kamboja melalui *Improving Food Security and Market Linkages for Smallholders* (MALIS) *Project*. Adapun MALIS *Project* diselenggarakan di sembilan kabupaten sasaran di Provinsi Oddar Meanchey dan Preah Vihear (FAO, 2016).

MALIS *Project* bekerja dengan 49 organisasi berbasis masyarakat melalui beberapa program, seperti *Farmers Field School* (FFS) dan *Farmers Business School* (FBS). MALIS *Project* bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat pedesaan serta

ketahanan pangan dan gizi melalui produksi pertanian, pemasaran dan pengembangan usahakecil. Adapun program *Farmers Business School* (FBS) yang berada di bawah MALIS *Project* berkontribusi dalam peningkatan kapasitas bagi petani kecil dan kelompok tani, meningkatkan akses para petani ke pasar, dan meningkatkan hasil dan profitabilitas usaha pertanian. Sebanyak 20 *Farmers Business School* (FBS) didirikan dan memberikan pelatihan bagi kelompok tani dengan jumlah peserta sebanyak 320 orang. Pelatihan yang diberikan berfungsi sebagai jalan untuk peningkatan kapasitas. Selain itu melalui FBS, FAO membantu dalam menciptakan jaringan untuk 49 kelompok tani dengan total keanggotaan lebih dari 4.000 rumah tangga yang akan menghubungkan para petani ke pedagang, pemasok sarana pertanian, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lembaga pemerintah, serta meningkatkan akses para petani ke jangkauan pasar yang lebih luas dalam menjual hasil produksi pertanian mereka. Melalui program ini FAO bertujuan untuk menciptakan situasi di mana pertanian memiliki kontribusi secara signifikan pada peningkatan mata pencaharian para petani dan kondisi kehidupan petani kecil.

Bentuk kedua dari upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh FAO bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kamboja, *SNV Netherlands Development Organization*, serta *International Development Enterprises* (iDE) adalah melalui *Project for Agricultural Development and Economic Empowerment* (PADEE). PADEE bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui peningkatan produktivitas pertanian dan diversifikasi sumber pendapatan masyarakat pedesaan. Adapun program inidilakukan di 33 kabupaten yang ada di lima provinsi dengan jumlah rumah tangga miskin pedesaan yang tinggi. Lima provinsi tersebut

adalah Kampot, Kandal, Prey Veng, Svay Rieng dan Takeo (FAO. 2016).

Melalui PADEE petani mendapatkan akses ke layanan keuangan berupa pinjaman mikro yang dapat membantu petani mengakses sumber daya untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan lainnya, sarana pertanian maupun kebutuhan jangka pendek lainnya. Lebih lanjut FAO juga akan memberikan kursus pelatihan mengenai manajemen keuangan, seperti perencanaan dan pengelolaan arus kas rumah tangga yang tepat. Selain itu pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian serta kegiatan ekonomi berbasis non lahan juga akan diberikan dalam upaya meningkatkan sumber pendapatan.

Upaya FAO dalam pengentasan kemiskinan di Kamboja selanjutnya direalisasikan melalui *Participatory Guarantee Systems* (PGS) yang bekerjasama dengan *International Federation of Organic Agriculture Movements* (IFOAM). PGS diperkenalkan kepada petani kecil sebagai alat untuk membantu meningkatkan mata pencaharian mereka melalui praktik pertanian yang berkelanjutan serta meningkatkan akses ke pasar dengan harga yang stabil dan adil bagi petani (FAO, 2018). Praktik pertanian berkelanjutan yang dimaksud adalah dengan pelatihan praktik yang baik untuk pengelolaan kesuburan tanah, termasuk pertanian organik. FAO dan IFOAM melalui PGS memberikan dukungan melalui berbagai misi lapangan, lokakarya, pelatihan, dan pertemuan. Adapun program ini dilakukan di Battambang, Kandal, Kampong Speou, Takeo, dan Kampong Chang. Sebanyak 255 petani yang terbagi kedalam 15 kelompok PGS mendapat pelatihan teknik produksi organik.

- **Upaya FAO dalam Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi**

Ketahanan pangan dan gizi menjadi salah satu prioritas dalam CPF Tahun 2016-

2018 di Kamboja. FAO melalui *Farmers Field School* (FFS) di bawah *MALIS Project* melakukan beberapa kegiatan yang bersifat edukatif dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi. Adapun kegiatan yang dilakukan yakni penyuluhan mengenai ilmu nutrisi, promosi pola makan sehat, pentingnya diversifikasi pangan, serta pentingnya memiliki kebun untuk memproduksi tanaman bergizi lainnya yang dapat membantu dalam menyediakan pangan yang lebih beragam dan bergizi. FFS bertujuan untuk meningkatkan keragaman produksi dan ketersediaan sumber makanan bergizi dari pertanian. Sebanyak 174 FFS didirikan di sembilan kabupaten sasaran di Provinsi Oddar Meanchey dan Preah Vihear dengan menjangkau sekitar 3.700 rumah tangga (FAO, 2016).

Bentuk lain dari upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi yang dilakukan FAO di Kamboja yakni melalui program *Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation* (FIRST). Program FIRST bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Kamboja dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan serta program terkait ketahanan pangan dan gizi. Melalui FIRST, FAO menyediakan ahli kebijakan yang akan bekerjasama dengan pemerintah Kamboja dalam membuat rencana, program, serta kebijakan terkait ketahanan pangan dan gizi melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada pembinaan (FAO, 2018). Melalui program FIRST, pelatihan tentang ketahanan pangan dan gizi telah diberikan kepada staf *Council for Agricultural and Rural Development* (CARD).

Upaya FAO dalam peningkatan ketahanan pangan dan gizi di Kamboja selanjutnya direalisasikan melalui pengembangan kurikulum pendidikan tentang nutrisi. Kurikulum pendidikan mengenai nutrisi dikembangkan oleh FAO bekerjasama dengan CARD, Kementerian Pendidikan

Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Bantuan teknis ini bertujuan dalam pengembangan kapasitas guru sekolah mengenai nutrisi sebagai upaya untuk mengatasi masalah pangan dan gizi di kalangan anak-anak sekolah dasar (FAO, 2018).

Analisis Peran FAO di Kamboja

Selaku organisasi internasional yang bergerak pada bidang pangan dan agrikultur, FAO telah melakukan upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi di Kamboja. Pada sub bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah mengenai peran FAO dalam permasalahan ketahanan pangan di Kamboja. Analisis mengenai peran organisasi internasional akan penulis fokuskan pada dua fungsi yaitu Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pengembangan yang terdiri dari tingkat lokal dan nasional.

1. Fungsi Pengawasan

Pada Fungsi Pengawasan penting bagi organisasi internasional membangun suatu kerangka kerja pemantauan yang menyajikan alat evaluasi. Alat evaluasi yang dimaksud adalah *Surveillance Cycle*. FAO membantu kamboja dalam permasalahan kerawanan pangan melalui *Country Programming Framework* (CPF) pada tahun 2016 hingga 2018. CPF merupakan alat yang digunakan oleh FAO untuk menentukan respon jangka menengah terhadap kebutuhan bantuan negara-negara anggota dalam mencapai tujuan pembangunan nasionalnya (FAO, 2012). Sehingga CPF mengandung prioritas negara, kontribusi, serta hasil yang ingin dicapai.

Proses perumusan CPF terdiri dari serangkaian kegiatan yang disebut *The CPF Cycle* atau Siklus CPF. Siklus CPF terdiri dari tiga fase utama yakni Perumusan dan persetujuan (*Formulation and approval*); Implementasi (*Implementation*); dan Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi (*Monitoring, reporting, and evaluation*) (FAO,

2015). Adapun pada fase pertama yakni perumusan dan persetujuan, yang mana pada tahap ini terdiri dari 5 langkah utama yakni *Starting, Setting Priorities, Prepares CPF, Quality Review, Government Endorsement*. Pada langkah pertama *Starting*, FAO memiliki peran penting sebagai aktor utama untuk memimpin konsultasi dengan pemerintah terkait yang kemudian mengarah pada kesepakatan yang dicapai antara FAO dan pemerintah untuk meluncurkan proses perumusan CPF.

Langkah selanjutnya pada fase perumusan dan persetujuan adalah *Setting Priorities*. Pada langkah ini dilakukan konsultasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan, kebutuhan dan prioritas negara, serta bantuan apa yang akan diberikan oleh FAO serta hasil yang diharapkan untuk dicapai oleh negara tersebut. Berdasarkan konsultasi dan analisis yang dilakukan pada langkah kedua, hasil dari langkah ini kemudian mengarah pada langkah ketiga yakni *Prepares CPF*, yang mana pada tahap ini dokumen dan lampiran CPF disiapkan. Langkah selanjutnya yakni *Quality Review*, pada langkah ini dokumen CPF ditinjau kembali untuk memastikan bahwa CPF sudah memenuhi standar kualitas panduan CPF baik dalam hal proses dan isinya. Langkah terakhir pada fase perumusan dan persetujuan adalah *Government Endorsement*, yang mana pada langkah ini FAO melakukan penyerahan dokumen CPF kepada pemerintah terkait untuk dilakukan pengesahan.

Fase kedua pada Siklus CPF adalah Implementasi. Pada fase ini CPF kemudian dilaksanakan melalui berbagai program FAO yang didanai melalui kontribusi sukarela. Pengimplementasian CPF ini harus mengarah pada hasil yang diharapkan untuk dicapai melalui CPF dan di implementasikan sesuai dengan aturan serta standar FAO. Fase yang terakhir yaitu, Pemantauan, pelaporan dan

evaluasi. Pada fase ini pemantauan dilakukan secara berkesinambungan oleh FAO dan pemegang anggaran tingkat negara. Kegiatan ini dilakukan untuk meninjau dan mengarahkan bantuan ataupun kontribusi yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Kerjasama yang dilakukan oleh FAO dan Kamboja melalui CPF di tahun 2016, kemudian menjadi bukti bahwa FAO selaku organisasi internasional telah menjalankan salah satu peran yang dimiliki oleh organisasi internasional dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi yakni Fungsi Pengawasan. Hal ini dapat dilihat dari FAO membangun suatu kerangka kerja pemantauan yang menyajikan *Surveillance Cycle*. Kerangka kerja tersebut adalah CPF. CPF dalam proses perumusannya memiliki *The CPF Cycle* atau Siklus CPF yang mewakili indikator yang ada pada *Surveillance Cycle*. Yang mana pada Siklus CPF terdapat langkah yang disebut *Setting Priorities*. Pada langkah ini dilakukan konsultasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan, kebutuhan dan prioritas negara, serta bantuan apa yang akan diberikan oleh FAO. Langkah ini sesuai dengan tahap yang ada pada *Surveillance Cycle* yakni dilakukan pengumpulan data dan analisis (Kotak 2), serta keputusan tindakan/langkah-langkah yang dapat diambil (Kotak 3).

Langkah selanjutnya pada Siklus CPF yakni Implementasi. Pada fase ini CPF kemudian dilaksanakan melalui berbagai program yang sudah ditentukan sebelumnya pada tahap *Setting Priorities*. Fase ini sesuai dengan tahap yang ada pada *Surveillance Cycle* yakni Implementasi (Kotak 4). Langkah terakhir pada Siklus CPF yakni Pemantauan, pelaporan dan evaluasi. Pada fase ini dilakukan pemantauan dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan untuk meninjau dan mengarahkan bantuan ataupun kontribusi yang dilakukan

sesuai dengan hasil yang diharapkan. Fase ini kemudian sesuai dengan tahap yang ada pada *Surveillance Cycle* yakni pemantauan dan evaluasi (Kotak 5).

2. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengembangan merupakan fungsi yang menjelaskan mekanisme yang dapat diambil oleh organisasi internasional, untuk menciptakan kondisi yang diharapkan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

• Tingkat Lokal

Saat ini produksi dan distribusi pangan bersifat terindustrialisasi, padat modal, dan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Hal ini kemudian berakibat pada: 1. Sedikitnya buruh manusia dipekerjakan; dan 2. Hasil produksi banyak dengan biaya sedikit. Dua hal ini kemudian menciptakan persaingan yang tidak sempurna. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki modal besar dan dapat menekan harga semurah-murahnya tanpa mengalami kerugian. Sehingga menciptakan keuntungan bagi perusahaan besar. Zutphen *et al* (2018) berargumen bahwa perlu dilakukan upaya agar petani kecil maupun produsen makanan lokal juga dapat ikut berkompetisi.

Oleh karena itu petani kecil maupun produsen makanan lokal, harus dibantu agar bias masuk ke pasar dan memberikan kesempatan bagi produk mereka agar dapat ikut bersaing secara harga, dan dilirik oleh konsumen. Sehingga penting bagi organisasi internasional melakukan upaya untuk menciptakan peluang bagi petani kecil dan produsen makanan lokal untuk berpartisipasi dalam pasar lokal tanpa harus bergantung pada korporasi besar. Kebebasan ketergantungan terhadap korporasi besar dapat dicapai dengan meningkatkan investasi di ekosistem lokal; memperkuat kapasitas teknis dan manajerial pemangku kepentingan; kemudahan fasilitas ke

akses pembiayaan; dan pemberian kesempatan kepada petani untuk mengatur dirinya.

FAO selaku organisasi internasional melakukan beberapa mekanisme untuk menciptakan kondisi yang diharapkan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Kamboja. Di tingkat lokal FAO mendirikan 20 *Farmers Business School* (FBS) yang berada di bawah *MALIS Project*. Adapun FBS diselenggarakan di sembilan kabupaten sasaran di Provinsi Oddar Meanchey dan Preah Vihear. Melalui FBS, FAO berkontribusi pada peningkatan kapasitas akses ke pasar, hasil pertanian, dan profitabilitas usaha pertanian bagi petani kecil dan kelompok tani. Selain itu melalui FBS, FAO membantu menciptakan jaringan yang nantinya akan menghubungkan para petani ke pedagang, pemasok sarana pertanian, LSM, dan lembaga pemerintah, serta meningkatkan akses para petani ke jangkauan pasar yang lebih luas dalam menjual hasil produksi pertanian mereka.

Bentuk kedua dari mekanisme yang diambil oleh FAO untuk menciptakan kondisi yang diharapkan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Kamboja adalah melalui *Project for Agricultural Development and Economic Empowerment* (PADEE). Adapun program ini dilakukan di 33 kabupaten yang ada di lima provinsi yaitu Kampot, Kandal, Prey Veng, Svay Rieng dan Takeo. Melalui PADEE petani mendapatkan akses ke layanan keuangan berupa pinjaman mikro yang dapat membantu petani mengakses sumber daya untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan lainnya, sarana pertanian maupun kebutuhan jangka pendek lainnya. PADEE nantinya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui peningkatan produktivitas pertanian dan diversifikasi sumber pendapatan masyarakat pedesaan. Mekanisme selanjutnya yang diambil oleh FAO adalah melalui *Participatory Guarantee Systems* (PGS). PGS diperkenalkan kepada petani kecil,

sebagai alat untuk membantu meningkatkan mata pencaharian mereka melalui praktik pertanian yang berkelanjutan serta meningkatkan akses ke pasar dengan harga yang stabil dan adil bagi petani. FAO melalui PGS memberikan dukungan melalui berbagai misi lapangan, lokakarya, pelatihan, dan pertemuan. Adapun program ini dilakukan di Battambang, Kandal, Kampong Speou, Takeo, dan Kampong Chang.

Melalui *Farmers Business School* (FBS), *Project for Agricultural Development and Economic Empowerment* (PADEE), serta *Participatory Guarantee Systems* (PGS), FAO selaku organisasi internasional menjalankan salah satu peran yang dimiliki oleh organisasi internasional dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi yakni Fungsi Pengembangan khususnya di tingkat lokal. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses para petani ke jangkauan pasar yang lebih luas dalam menjual hasil produksi pertanian mereka tanpa harus bergantung pada korporasi besar.

• **Tingkat Nasional**

Di tingkat nasional penting bagi organisasi internasional mendukung pemerintah untuk menerapkan kebijakan terkoordinasi untuk memastikan ketahanan pangan. Dukungan yang diberikan dapat dilakukan melalui berinvestasi di lembaga penelitian dan pengujian keamanan pangan yang lebih baik, serta membantu dengan menyelaraskan standar dan peraturan, inspeksi, sertifikasi, dan prosedur akreditasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi. FAO dalam upayanya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Kamboja dengan mengadakan program *Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation* (FIRST). Melalui FIRST, FAO menyediakan ahli kebijakan yang nantinya akan bekerja sama dengan pemerintah

Kamboja dalam membuat rencana, program, serta kebijakan terkait ketahanan pangan dan gizi.

Melalui, *Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation* (FIRST) FAO selaku organisasi internasional menjalankan salah satu peran yang dimiliki oleh organisasi internasional dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi yakni Fungsi Pengembangan khususnya di tingkat nasional. FIRST menjadi bentuk dukungan yang diberikan oleh FAO kepada pemerintah Kamboja, yang mana melalui FIRST akan membantu dalam meningkatkan kapasitas pemerintah Kamboja dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan maupun program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi.

PENUTUP

FAO sebagai organisasi internasional telah menjalankan peran yang dimiliki oleh organisasi internasional dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi. Peran tersebut adalah Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pengembangan di tingkat lokal dan nasional. Apabila dilihat dari Fungsi Pengawasan, FAO telah membangun suatu kerangka kerja pemantauan yang menyajikan alat evaluasi. Di tahun 2016 FAO bekerja sama dengan pemerintah Kamboja melalui *Country Programming Framework* (CPF). CPF menjadi kerangka kerja pemantauan yang dibangun oleh FAO dalam upayanya membantu permasalahan ketahanan pangan dan gizi yang terjadi di Kamboja. Adapun CPF merupakan kerangka kerja pemantauan yang sekaligus menyajikan alat evaluasi tersendiri. CPF dalam proses perumusannya memiliki *The CPF Cycle* atau Siklus CPF yang mana tahap-tahap yang ada pada Siklus CPF memiliki kesamaan dengan tahap-tahap pada *Surveillance Cycle*.

Pada Fungsi Pengembangan, FAO selaku organisasi internasional telah melakukan beberapa mekanisme untuk

menciptakan kondisi yang diharapkan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Kamboja, khususnya di tingkat lokal dan nasional. Di tingkat lokal FAO bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait, telah menjalankan beberapa program seperti *Farmers Business School (FBS)*, *Project for Agricultural Development and Economic Empowerment (PADEE)*, serta *Participatory Guarantee Systems (PGS)* dalam upayanya untuk menciptakan peluang dalam meningkatkan akses bagi petani kecil ke jangkauan pasar yang lebih luas dalam menjual hasil produksi pertanian mereka tanpa harus bergantung pada korporasi besar. Kemudian di tingkat nasional, *Food and Nutrition Security Impact, Resilience, Sustainability and Transformation (FIRST)* menjadi bentuk dukungan yang diberikan oleh FAO kepada pemerintah Kamboja untuk menerapkan kebijakan terkoordinasi untuk memastikan ketahanan pangan.

Daftar Pustaka

Buku

- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jones, David. (1976). *Food and Interdependence*. London: Overseas Development Studies.
- Neack, Laura. (2008). *The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era*. Plymouth: Rowman & Littlefield Publisher.
- Trihartono, A., SuryaniIndriastuti, dan Chairun Nisya. (2020). *Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional*. Depok: Melvana Publishing.

Jurnal atau Karya Ilmiah

- Culas, R. J., & Tek, K. (2016). *Food Security in Cambodia: Trends and Policy Objectives*. Diunduh pada URL: <https://sci-hub.do/10.1108/IJDI-06-2016-0033> [Diakses pada 19 Mei 2021]
- Pujayanti, Adirini. (2011). *Politik Pangan Di Era Globalisasi*. Diunduh pada URL: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/290> [Diakses pada 15 Mei 2021]
- Rivai, Aspin Nur Arifin. (2020). *Dialog Insecuritas Pangan Berdasarkan Kajian Keamanan Internasional*:

Gugatan Pendekatan Kritis Terhadap Pendekatan Arus-Utama. Diunduh pada URL: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/rir/article/view/19008> [Diakses pada 26 Januari 2022]

- Sagena, Uni W. (2013). *Memahami Keamanan Tradisional dan Non-Tradisional di Selat Malaka: Isu-Isu dan Interaksi antar Aktor*. Diunduh pada URL: <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JHII/article/view/1891> [Diakses pada 15 Mei 2021]
- Simon, G. (2017). *Food Security Governance History, Definitions and United Nations Institutions*. MA Thesis. Rome: Roma Tre University
- Sophal, C. 2011. *The Impact of High Food Prices on Food Security in Cambodia*. Diunduh pada URL: <https://sci-hub.se/10.1080/09614524.2011.561294> [Diakses pada 14 April 2022]
- Van Zutphen, K. G., Lingala, S., Bajoria, M., Beesabathuni, K., & Kraemer, K. (2018). *The Role of International Agencies in Achieving Food Security*. Diunduh pada URL: <https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.22447-5> [Diakses pada 22 Juli 2021]

Daring

- Council for Agricultural and Rural Development. 2008. *Kingdom of Cambodia Nation Religion King: Strategic Framework for Food Security and Nutrition in Cambodia 2008-2012*. Diunduh pada URL: https://www.gafspfund.org/sites/default/files/inline-files/Cambodia_4_of_16_STRATEGY_Food_Security_and_Nutrition_Strategy_0.pdf [Diakses pada 28 Februari 2022]
- Food and Agriculture Organization (FAO). 2015. *Guide to the Formulation of the Country Programming Framework (CPF)*. Diunduh pada URL: <https://www.fao.org/3/bb020e/bb020e.pdf> [Diakses pada 10 Juni 2022]
- Food and Agriculture Organization (FAO). 2016. *Kingdom of Cambodia: FAO Country Programming Framework 2016-2018*. Diunduh pada URL: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO-countries/Cambodia/CPF/CPF_Cambodia_2016-18_Final.pdf [Diakses pada 5 Juni 2021]
- Food and Agriculture Organization (FAO). 2016. *Summary of the Food Security Intervention: Improving Food Security and Market Linkages for Smallholders (MALIS)*. Diunduh pada URL:

- <https://www.fao.org/3/bc619e/bc619e.pdf> [Diakses pada 13 Juli 2022]
- Food and Agriculture Organization (FAO). 2016. *Project for Agricultural Development and Economic Empowerment (PADEE)*. Diunduh pada URL: <https://www.fao.org/3/av123e/av123e.pdf> [Diakses pada 13 Juli 2022]
- Food and Agriculture Organization (FAO). 2018. *Evaluation of FAO's Contribution to The Kingdom of Cambodia*. Diunduh pada URL: <https://www.fao.org/3/ca4448en/CA4448EN.pdf> [Diakses pada 14 Juli 2022]
- Food and Agriculture Organization (FAO). 2018. *Outline Report: Regional project completion workshop "Small-Scale Farmer Inclusion in Organic Agriculture Development through Participatory Guarantee Systems (PGS)*. Diunduh pada URL: <https://www.fao.org/3/I8807EN/i8807en.pdf> [Diakses pada 14 Juli 2022]
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2018). *Your Guide to FAO*. Diunduh pada URL: <http://www.fao.org/3/i9752en/I9752EN.pdf> [Diakses pada 18 Mei 2021]
- Food and Agriculture Organization (FAO). 2022. *About FAO*. Diunduh pada URL: <https://www.fao.org/about/en/> [Diakses pada 18 Mei 2021]
- Global Nutrition Report. (2014). *Cambodia: The Burden of Malnutrition at A Glance* Diunduh pada URL: <https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/south-eastern-asia/cambodia/> [Diakses pada 5 Juni 2021]
- OECD/FAO. (2016). *International Regulatory Cooperation and International Organisations: The case of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)*. Diunduh pada URL: https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/FAO_Full-Report.pdf [Diakses pada 18 Mei 2021]
- Monthivuth, Ker. 2011. *Scoping Study on Food Security and Nutrition Information In Cambodia*. Diunduh pada URL: https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/eu_fao_fsi4dm/docs/Cambodia_Food_Security_Information_Scoping_Study.pdf [Diakses pada 19 April 2022]
- Noush, Haitham El. 2010. *Cambodia Food Market Analysis and Survey Report*. Diunduh pada URL: <https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp244779.pdf> [Diakses pada 16 April 2022]
- Oxford Poverty and Human Development Initiative. 2018. *Global MPI Country Briefing 2018: Cambodia (East Asia and the Pacific)*. Diunduh pada URL: https://ophi.org.uk/wp-content/uploads/CB_KHM-2.pdf [Diakses pada 15 April 2022]
- Poliveth, Lao. 2019. *Cambodia's Agriculture Productivity: Challenges and Policy Direction*. Diunduh pada URL: https://www.nbc.org.kh/download_files/research_papers/english/3.1.1.Report_of_Cambodia's_Agriculture.pdf [Diakses pada 14 April 2022]
- Smith, Jenny Leigh. 2017. *Food Security and Food Sovereignty in Cambodia 1979-1989*. Diunduh pada URL: <https://www.iss.nl/media/61532> [Diakses pada 19 Maret 2022]
- World Food Programme (WFP). (2017). *Kingdom of Cambodia Nation Religion King: Mid-Term and Strategic Review of the National Strategy for Food Security and Nutrition 2014-2018 I. Progress Inventory 2016*. Diunduh pada URL: https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074210/download/?_ga=2.244626629.1552539294.1623469711-1436721800.1616599715 [Diakses pada 5 Juni 2021]
- World Food Programme (WFP). 2017. *Fill the Nutrient Gap Cambodia: Summary Report*. Diunduh pada URL: <https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000070325/download/> [Diakses pada 19 April 2022]